



# **LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**KABUPATEN CILACAP**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan serta pelaporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan SPM ini memuat informasi terkait penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Cilacap yang menjadi amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui penetapan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cilacap.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini dapat menjadi bahan informasi dalam pengambilan kebijakan dalam pembangunan di wilayah Pemerintah Kabupaten Cilacap serta menjadi bahan dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di masing-masing perangkat daerah pada tahun selanjutnya.

Kami menyadari bahwa penyajian informasi dalam laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kami harapkan agar seluruh pihak terkait berkenan memberikan informasi serta saran dan masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja, agar dapat bermanfaat untuk penyelenggaraan pemerintahan pada masa yang akan datang.

Cilacap, Februari 2022,

**BUPATI CILACAP**



**H. TATTO SUWARTO PAMUJI**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Kebijakan Umum.....	3
D. Arah Kebijakan.....	10
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM .....	14
A. Bidang Urusan Pendidikan.....	14
B. Bidang Urusan Kesehatan .....	18
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum .....	25
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	28
E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	30
F. Bidang Urusan Sosial.....	39
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN.....	49
A. Bidang Urusan Pendidikan.....	49
B. Bidang Urusan Kesehatan .....	49
C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum .....	51
D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat.....	52
E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.....	52
F. Bidang Urusan Sosial.....	55
BAB IV PENUTUP.....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui Pemerintahan Daerah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka pelayanan yang diberikan bukan hanya pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah bukan lagi tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari (*standard operating procedure*), melainkan suatu pemenuhan kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup sejahtera berdasarkan standar hidup minimal yang ditetapkan, yang apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normal atau tidak layak atau bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, jenis pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui SPM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan penerapan SPM menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional. Dalam hal ini SPM ditetapkan oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di mana penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi urusan wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/2018 tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cilacap;
15. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 060/1179/03/Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cilacap.
16. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 100/2925 tanggal 5 November 2021 perihal Laporan Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

### **C. KEBIJAKAN UMUM**

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 ditetapkan pada 18 Mei 2018, sehingga jenis dan mutu pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum sepenuhnya diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut.

Namun demikian, upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang merupakan salah satu tujuan diterapkannya SPM sejalandengan Visi Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yaitu “Cilacap Semakin Sejahtera Secara Merata Bangga Membangun Desa” yang diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan Daerah sebagai berikut :

1. Misi 1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga;
2. Misi 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat entrepreneur dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*;
3. Misi 3. Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
4. Misi 4. Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional;
5. Misi 5. Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Adapun Visi, Misi Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Cilacap dalam dokumen RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 : Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani serta kesejahteraan sosial dan keluarga		
Tujuan 1 : Mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan	1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas proses pembelajaran pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal</li> <li>2. Optimalisasi penerapan pendidikan karakter pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal</li> <li>3. Peningkatan kualitas dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal</li> <li>4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal</li> <li>5. Optimalisasi peran swasta dalam membantu penyelenggaraan pendidikan</li> <li>6. Peningkatan peran orang tua dalam menunjang pendidikan anak termasuk</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		pendidikan karakter
	2. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas penanganan kesehatan ibu dan anak, dengan cara meningkatkan cakupan kunjungan ibu hamil (K4), peningkatan prevalensi ASI eksklusif dan penanganan kasus beresiko</li> <li>2. Peningkatan kualitas pelayanan gizi buruk dan stunting dengan meningkatkan pelayanan kesehatan anak balita dan perbaikan gizi</li> <li>3. Peningkatkan kualitas penanganan penyakit menular yaitu DBD, HIV/AIDS, TB, Diare, Pnemonia, Hepatitis dan leptospirosis</li> <li>4. Peningkatan kualitas penanganan penyakit tidak menular yaitu hipertensi, DM</li> <li>5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan</li> <li>6. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>7. Peningkatan kesadaran</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam mendukung Germas (Gerakan Masyarakat) untuk hidup sehat</p> <p>8. Peningkatan kualitas akses sanitasi dasar (jamban keluarga penyediaan air bersih, SPAL dan penanganan sampah) baik pada tatanan rumah tangga maupun tempat-tempat umum</p> <p>9. Peningkatan advokasi, promosi kesehatan dan edukasi kesehatan kepada para pihak.</p>
<p>Tujuan 2: Meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender dan perlindungan anak</p>	<p>1. Meningkatnya kesejahteraan sosial</p>	<p>1. Peningkatan cakupan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>2. Peningkatan peran dan kompetensi PSKS dan TKSK dalam membangun kesejahteraan PMKS</p> <p>3. Mengembangkan usaha kesejahteraan sosial</p> <p>4. Memperkuat jaringan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		lembaga pelayanan bagi PMKS
Misi 3 : Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat		
Tujuan 4 : Meningkatkan kondusivitas dan keamanan serta perlindungan masyarakat	2. Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kasus-kasus kejahatan dan kriminalitas</li> <li>2. Peningkatan kualitas dan kompetensi serta kuantitas Satpol PP</li> <li>3. Peningkatan kualitas keamanan pada titik-titik rawan kejahatan</li> <li>4. Peningkatan kualitas penegakan aturan, penertiban, pengawasan, pemantauan untuk pencegahan gangguan, potensi konflik serta pemberantasan penyakit masyarakat.</li> </ol>
	3. Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengelolaan dan penanggulangan bencana</li> <li>2. Penyusunan kebijakan pengelolaan dan penanggulangan bencana</li> <li>3. Pembentukan desa/ kelurahan tangguh bencana, sekolah tangguh bencana</li> <li>4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan</li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		<p>pasca bencana</p> <p>5. Pemberian bantuan kebutuhan dasar tanggap darurat.</p>
<p>Misi 5 : Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam cara berkelanjutan</p>		
<p>Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</p>	<p>1. Terwujudnya infrastruktur wilayah yang baik</p>	<p>1. Peningkatan cakupan penduduk dengan air minum layak</p> <p>2. Peningkatan cakupan ketersediaan sanitasi layak, perumahan layak terutama korban bencana dan penduduk terkena dampak serta penanganan pemukiman kumuh</p> <p>3. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memelihara kebersihan dan kondisi sanitasi di lingkungan pemukiman masing-masing</p>
	<p>2. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas</p>	<p>1. Peningkatan layanan penanganan sampah, limbah domestik dan limbah industri</p> <p>2. Pengembangan infrastruktur, kegiatan pertanian, perikanan, industri,</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi
		perdagangan dan permukiman yang ramah lingkungan dan mendukung mitigasi bencana

#### D. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Pemerintah yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari *money follow function* menjadi *money follow programme*, bertujuan agar pencapaian pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berjalan maksimal (berhasil), fokus dan tepat sasaran. Kebijakan ini diimplementasikan dengan mengarahkan alokasi anggaran untuk fokus pada prioritas pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisiensi anggaran program non prioritas. Di samping itu, program dan kegiatan diprioritaskan untuk menyelesaikan pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Cilacap serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 256 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goal's* (SDGs) Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2022.

Selanjutnya berkaitan dengan terjadinya wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mengakibatkan terjadinya *refocusing* dan realokasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2020 yang difokuskan untuk penanganan COVID-19, maka prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2021 juga diarahkan untuk upaya *recovery* (pemulihan) sektor-sektor yang terdampak seperti industri dan perdagangan, pariwisata dan investasi, penguatan sistem kesehatan, sistem jaring pengaman sosial dan sistem ketahanan bencana, dan tetap fokus pada

arah dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.

Pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022 diarahkan pada “Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Dalam Memperkuat Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan”. Arah kebijakan tersebut mengandung maksud bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap tetap konsisten untuk melanjutkan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang diarahkan pada “Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah Dalam Rangka Memperkuat Pengembangan Wilayah Pinggiran dan Perbatasan” dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk membuka akses/menghubungkan dengan pusat-pusat perekonomian, sentra-sentra produksi/dan kawasan wisata, khususnya yang berada di wilayah pinggiran dan perbatasan.

Berkaitan dengan terjadinya wabah COVID-19, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Cilacap Tahun 2021 mengalami penyesuaian agar adaptif dan responsif dalam mengantisipasi perubahan tatanan baru dan guna percepatan penanganan dan pemulihan dampak COVID-19. Di samping itu, perubahan juga dalam rangka menjaga konsistensi, keselarasan dan sinergitas dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Penyesuaian arah kebijakan pembangunan Kabupaten Cilacap menjadi **“Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Ketahanan Sosial dan Bencana Didukung Infrastruktur yang Berkualitas,”** dengan perubahan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemulihan perekonomian berbasis pembangunan ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing daerah, difokuskan pada:
  - a. Peningkatan kualitas produk unggulan, penguatan usaha mikro kecil menengah, koperasi dan peningkatan pasar tradisional serta Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang disertai perluasan pemasaran;
  - b. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan obyek/destinasi wisata, pemasaran wisata dan event-event pariwisata;
  - c. Peningkatan minat investasi melalui perizinan terintegrasi dan peningkatan ekspor berbasis produk-produk unggulan Kabupaten Cilacap;

- d. Peningkatan ketahanan pangan melalui optimalisasi produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, nilai tambah dan keragaman produk pangan;
  - e. Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta hasil inovasi pada produk dan pemasaran UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pangan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia, difokuskan pada :
- a. Penguatan Germas (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) yang adaptif sesuai protokol kesehatan melalui PHBS, CTPS, pakai masker, jaga jarak (*social dan pysical distancing*) dan lain-lain;
  - b. Peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar (puskesmas dan puskesmas pembantu) serta sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - c. Pemenuhan kebutuhan dan penguatan kapasitas, kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan, pendidikan dan tenaga teknis serta fungsional.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar, difokuskan pada:
- a. Peningkatan dan penataan Infrastruktur yang menghubungkan kewilayah perbatasan dengan Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen serta pemantapan akses menuju kawasan Segara Anakan dan sekitarnya;
  - b. Penguatan konektivitas melalui peningkatan kualitas jalan/jembatan untuk peningkatan akses transportasi yang menghubungkan pusat-pusat perekonomian, kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan mempermudah akses ke destinasi wisata dan penguatan ketahanan bencana serta peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan.
4. Percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), difokuskan pada :
- a. Optimalisasi pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penguatan jaring pengaman sosial;
  - b. Peningkatan ketrampilan berusaha dan perluasan lapangan kerja bagi PMKS;

- c. Penyiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi dan ketrampilan;
  - d. Penanganan kawasan kumuh dan penyehatan lingkungan (RTLH, sanitasi, air bersih).
5. Penguatan ketahanan bencana dengan memperhatikan pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan, difokuskan pada:
- a. Pengurangan risiko bencana melalui upaya mitigasi dan penanganan korban bencana, penguatan manajemen krisis terpadu dan data bencana terpadu serta sistem logistik untuk operasi tanggap darurat;
  - b. Pengelolaan lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran dan pengurangan kerusakan lingkungan untuk meningkatkan kualitas air, tanah dan udara;
  - c. Optimalisasi pengelolaan sampah melalui peningkatan sarana prasarana persampahan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta prioritas pengelolaan sampah melalui penerapan teknologi pengolahan sampah pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;
  - d. Pembangunan ruang terbuka hijau sebagai penunjang kualitas lingkungan hidup.
6. Pemanjagan tata kelola pemerintahan, peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, difokuskan pada:
- a. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan dan penataan ASN, pemanfaatan TI untuk mendukung penyelenggaraan *e-gov* dan tatanan kehidupan baru serta peningkatan pengawasan internal;
  - b. Peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi, transparansi dan mendorong partisipasi publik;
  - c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
  - d. Peningkatan keamanan lingkungan dengan mengutamakan pencegahan ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - e. Pemberantasan penyakit masyarakat melalui penguatan KAPA/KAMA narkoba.

## BAB II

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

#### A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan meliputi:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Anak Usia 5-6 tahun	62.697
2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7-15 tahun	283.746
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah	37.348

##### 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Pendidikan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	28.960 orang
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	192.082 orang
		Jumlah warga negara usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	91.664 orang
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	28.880 orang

##### 3. Realisasi Pencapaian SPM

a. Tabel Pencapaian Penerima Layanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	28.960 orang	28.960 orang	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI)	192.082 orang	182.069 orang	94,8
		Jumlah warga negara usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SMP/MTs)	91.664 orang	71.852 orang	78,4
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesetaraan	28.880 orang	28.880 orang	100

b. Tabel Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar		
				Jumlah orang yang terlayani	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Buku Gambar	28.880	28.880	100	
		Alat Mewarnai	28.880	28.880	100	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0	
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	544	479	88,05	
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	1.486	1.175	79,07	
		Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	1.486	1.472	99,06	
		Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	544	263	48,35	
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>				<b>73,50</b>

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
2	Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran	75.340	75.340	100
		Perlengkapan Belajar	75.340	75.340	100
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	1.499	1.279	85,32
		Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.499	1.295	86,39
		Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	11.245	11.018	97,98
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	75.340	75.340	100
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	11.245	11.245	100
		Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal c	1.499	1.193	79,59
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
3	Pendidikan Kesetaraan	Modul Belajar	772	772	100
		Jumlah rombongan belajar di PKBM	184	154	83,70
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik	0	0	0
		Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	184	184	100

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
		Kualitas tenaga kependidikan (kepala sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	27	27	100
		Kualitas tenaga kependidikan (tenaga admin/tenaga lab/admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	27	27	100
		Perlengkapan Belajar	772	772	100
		PKBM Terakreditasi minimal C	27	27	100
<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>					<b>85,46</b>

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Urusan Pendidikan di Tahun 2021 adalah Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp295.553.584.943,- dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp285.549.129.753,- (atau persentase penyerapan anggaran 96,6%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

#### 5. Dukungan Personil

Jumlah personil pada Bidang Urusan Pendidikan yang dilaksanakan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah Personil
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Anak Usia 5-6 tahun	2.675
2	Pendidikan Dasar	Warga negara usia 7-15 tahun	17.636
3	Pendidikan Kesetaraan	Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah	3.073

## 6. Permasalahan dan Solusi

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Permasalahan	Solusi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah penduduk usia 5 -6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	RPJMD dan Renstra menggunakan indikator target usia 3-6 tahun	Memilah data per usia 5-6 tahun dan menentukan target yang akan dilayani
2	Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Tertundanya pelaksanaan kegiatan karena pandemi COVID-19	Mengalokasikan anggaran dan kegiatan ke tahun berikutnya
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	RPJMD dan Renstra menggunakan data kelembagaan terakreditasi sebagai indikator target	Memilah data per usia 7-18 tahun yang tidak sekolah dan menentukan target yang akan dilayani

## B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar Bidang Urusan Kesehatan meliputi:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ibu hamil di suatu kabupaten/kota	29.710
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota bersangkutan	27.652
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi baru lahir	27.533
4	Pelayanan kesehatan Balita	Balita	104.674
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Anak usia pendidikan dasar	59.601
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang usia produktif	1.352.574
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Warga negara usia lanjut	265.133
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penderita hipertensi	640.959
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	30.842
10	Pelayanan Kesehatan Orang	ODGJ berat	2.875

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
	dengan gangguan jiwa berat		
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Orang terduga TBC	18.857
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Orang dengan resiko HIV	32.484

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Kesehatan di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	29.710
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	27.652
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	27.533
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	104.674
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	59.601
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	1.352.574
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	265.133
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	640.959
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	30.842
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	2.875
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	18.857
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan Layanan Kesehatan	32.484

### 3. Realisasi Pencapaian SPM

a. Tabel Pencapaian Penerima Layanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	29.710	28.242	95,06
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	27.652	27.637	99,95
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	27.533	27.333	99,27
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	104.674	87.901	83,98
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan	59.601	59.271	99,45
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	1.352.574	914.823	67,64
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	265.133	178.246	67,23
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	640.959	306.917	47,88
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	30.842	29.341	95,13
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	2.875	2.875	100
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	18.857	6.774	35,92
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) yang mendapatkan	32.484	22.728	69,97

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
	(HIV)	Layanan Kesehatan			

- b. Tabel Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Buku KIA	29.710	29.710	100
		Tablet Tambah Daerah	29.710	29.710	100
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	0	0	0
		Kartu Ibu/Rekam Medis Ibu	29.710	29.710	100
		Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	29.710	29.710	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	27.637	27.637	100
		Buku KIA	27.637	27.637	100
		Formulir Fotograf	27.637	27.637	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
3	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Vaksin Hepatitis BO	27.533	27.533	100
		Vitamin K1 Injeksi	27.533	27.533	100
		Salep/Tetes Mata Antibiotik	27.533	27.533	100
		Formulir Bayi Baru Lahir	27.533	27.533	100
		Formulir MTBM	27.533	27.533	100
		Buku KIA	27.533	27.533	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
4	Pelayanan kesehatan Balita	Formulir DDTK	104.674	87.901	83,98
		Buku KIA	104.674	87.901	83,98
		Vitamin A Biru	12.772	12.772	100
		Vitamin A Merah	104.674	87.901	83,98
		Vaksin Imunisasi Lanjutan :	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
		* DPT -HB -Hib * Campak Rubella			
		Jarum Suntik dan BHP	0	0	0
		Peralatan Anafilaktik	0	0	0
		Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell	0	0	0
		Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	104.674	87.901	83,98
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>48,44</b>
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Buku Raport Kesehatanku	59.601	2.960	4,97
		Buku Pemantauan Kesehatan	59.601	2.960	4,97
		Kuesioner Skrining Kesehatan	59.601	1.549	2,60
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	1.549	1.549	100
		Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	38	38	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>42,51</b>
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	38	38	100
		Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	273	273	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	265.133	178.263	67,24
		Buku Kesehatan Lansia	265.133	178.263	67,24
		Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	265.133	178.263	67,24
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>67,24</b>
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	76	76	100
		Tensimeter	273	273	100
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	38	38	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	27.300	27.300	100
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	38	38	100
		Pedoman dan Media KIE	76	76	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	0	0	0
		Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	3	0	0
		Media KIE	4	4	100
		Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	1	1	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>50</b>
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulo-	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	18.857	6.774	35,92
		Reagen Zn TB	1.164	211	18,13
		Masker Jenis Rumah Tangga	3.880	3.242	83,56

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
	sis	dan Masker N95			
		Catridge Tes Cepat Molekuler	18.857	5.822	30,87
		Formulir Pencatatan dan Pelaporan	51	51	100
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur	51	51	100
		Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	37.714	18.180	48,20
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	32.484	22.728	69,97
		Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	32.484	22.728	69,97
		Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum Sduit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	32.484	22.728	69,97
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapain SPM di Bidang Urusan Kesehatan di Tahun 2021 adalah Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp6.973.053.229 dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp3.946.203.909,- (atau persentase penyerapan anggaran 56,59%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

## 5. Dukungan Personil

SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kabupaten Cilacap dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (termasuk Puskesmas di wilayah Kabupaten Cilacap, RSUD Cilacap, serta RSUD Majenang) dengan jumlah personil sebagai berikut:

NO.	UNIT ORGANISASI	PEGAWAI					GOL PPPK
		JUMLAH	GOL I	GOL II	GOL III	GOL IV	
1	Dinas Kesehatan	2.046	8	526	1.243	201	68

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

#### 1) Pengumpulan data

- Pengumpulan data dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan terkadang terlambat tidak sesuai dengan yang telah disepakai tanggal 5 setiap bulan karena SDM yang merekap dan melaporkan data juga sebagai vaksinator

#### 2) Penghitungan kebutuhan : data tidak valid

#### 3) Perencanaan dan penganggaran

- Dana yang tersedia tidak memenuhi semua sasaran

#### 4) Pelaksanaan : terkendala Pandemi menyebabkan kegiatan tidak dapat mengundang seluruh sasaran

### b. Solusi

Monitoring, evaluasi, dan validasi data setiap bulan

## C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum meliputi:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Penduduk Cilacap	1.785.971
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Penduduk Cilacap	1.785.971

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	1.785.971
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.785.971

## 3. Realisasi Pencapaian SPM

a. Tabel Pencapaian Penerima Layanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	TingkatCapaian %
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	1.785.971	1.567.011	87,74
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	1.785.971	1.604.516	89,84

b. Tabel Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	892.985	688.849	77,14
		Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	892.985	878.162	98,34
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>87,74</b>
2	Penyediaan pelayanan	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
	pengolahan air limbah domestik	Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha			
		Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	0	0	0
		Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	0	0	0
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>0</b>

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Tahun 2021 adalah Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp20.826.952.575,- dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp20.737.891.910,- (atau persentase penyerapan anggaran 99,57%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Jumlah Personil yang terlibat dalam proses penerapan SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah 13 (tiga belas) orang.

6. Permasalahan dan Solusi

-

**D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat meliputi:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Warga negara korban bencana	1
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	1

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	1
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1

### 3. Realisasi Pencapaian SPM

- a. Tabel Pencapaian Penerima Layanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga negara korban bencana yang memperoleh rumah yang layak huni	1	1	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten / kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	1	1*	100

Keterangan:

\* Capaian tersebut adalah capaian pendataan warga negara di daerah rawan bencana gerakan tanah di Desa Karanggantung, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap.

- b. Tabel Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	0	0	0
		Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0
		Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0
		Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	0	0	0
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
2	Fasilitasi penyediaan	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
	rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Tanah dan/Atau Bangunan			
		Subsidi Uang Sewa	0	0	0
		Penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	0
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>0</b>

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Tahun 2021 adalah Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp457.000.000,- dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp364.453.400,- (atau persentase penyerapan anggaran 79,74%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

#### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Jumlah Personil yang terlibat dalam proses penerapan SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum adalah 14 (empat belas) orang.

#### 6. Permasalahan dan Solusi

-

### E. BIDANG URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) meliputi:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap	Warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	1

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
	penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai Mutu	Warga negara yang terkena dampak penegakan Perda dan Perkada	37
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Warga negara di kawasan rawan bencana	1.945.220
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Warga negara di kawasan rawan bencana	1.945.220
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Warga negara yang menjadi korban bencana	24.395
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Warga negara yang menjadi korban kebakaran	78

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Trantibulinmas di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	37
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	38.126
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	24.395
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	24.395
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78

### 3. Realisasi Pencapaian SPM

#### a. Tabel Pencapaian Penerima Layanan Dasar Bidang Urusan

Trantibulinmas adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	1	1*	100
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap jumlah penegakan Perda sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	37	37	100
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	38.126	54.934	144
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	24.395	24.395	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	24.395	24.395	100
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	78	61	78,21

Keterangan:

\*Dalam penegakan Perda tidak mengakibatkan kerugian pelayanan pengobatan maupun kerugian materiil.

- b. Tabel Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Urusan Trantibulinmas adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	1	1*	100
		Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	1	1**	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>
2	Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban Umum terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai mutu	Penegakan Perda sesuai SOP	37	37	100
		Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	37	37	100
		Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	37	37	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	24.395	24.395	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>
4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1	1	100
		Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	38.126	38.126	100
		Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	38.126	38.126	100
		Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi	38.126	38.126	100

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	4	5	6
		dan Edukasi (KIE) rawan bencana			
		Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	150	150	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>100</b>
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	24.395	24.395	100
		Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	24.395	24.395	100
		Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	5	5	100
		Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	5	5	100
		Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis perioritas	0	0	0
		Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	122	122	100
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>83,33</b>
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	77	61	79,22
		Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	9	4	44,44
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>61,83</b>

Keterangan:

\* Tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan pada penegakan Perda.

\*\* Tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian materiil pada penegakan Perda.

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Urusan Trantibulinmas di Tahun 2021 (termasuk Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran Daerah, serta Sub Urusan Bencana Daerah) adalah Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp15.638.573.880,- dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp11.035.856.670,- (atau persentase penyerapan anggaran 70,57%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

#### 5. Dukungan Personil

a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran Daerah

Dukungan personil yang dilibatkan dalam penerapan SPM Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum, pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (termasuk di dalamnya sub Urusan Pemadam Kebakaran) sebagai berikut:

1) Jumlah PNS	=	56 orang
Jumlah Non PNS	=	76 orang
<b>Total</b>		<b>132 orang</b>

2) Kualifikasi pendidikan

No.	Kualifikasi pendidikan	Jumlah
1	S2	5 orang
2	S1	20 orang
3	D3	3 orang
4	SLTA	23 orang
5	SLTP	4 orang
6	SD	1 orang
	Non PNS	76 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>132 orang</b>

3) Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	Gol IV	3 orang
2	Gol III	32 orang
3	Gol II	19 orang
4	Gol I	2 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>56 orang</b>

4) Pejabat Struktural dan Fungsional

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	3 orang
3	Eselon IV	11 orang
4	Fungsional Pol PP	16 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>31 orang</b>

b. Sub Urusan Bencana Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan BPBD Kab. Cilacap sangat memerlukan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang handal, kompeten dan profesional. Saat ini pegawai BPBD Kab. Cilacap berjumlah 86 orang yang terdiri atas 40 (empat puluh) orang PNS, 46 (empat puluh enam) orang Non PNS/PTT/harian Lokal. Untuk lebih jelasnya komposisi Sumber Daya Manusia yang ada pada BPBD Kabupaten Cilacap, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
di BPBD Kab. Cilacap Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD/SMP Sederajat	2	-	5	-	7
2	SMA Sederajat	9	-	26	1	36
3	D2/D3	2	-	5	2	9
4	S1	15	1	3	4	23
5	S2	9	2			11
6	S3	-	-	-	-	0
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>3</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>86</b>

Uraian analisis kondisi pegawai perangkat daerah berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

*Jumlah pegawai 86 orang, dengan status kepegawaian :*

- PNS = 40 orang
- CPNS = - orang
- Harian kontrak = - orang
- Wiyata Bhakti = 46 orang

*Jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan :*

- Strata -2 = 11 orang
- Strata -1 = 23 orang
- Diploma 3 = 9 orang
- SLTA = 36 orang
- SLTP = 6 orang
- SD = 1 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran Daerah

#### 1) Permasalahan

- a) Keterbatasan personil Satuan Polisi Pamong Praja dan tidak sebanding dengan luasnya wilayah dan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Cilacap;
- b) Masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah yang mengakibatkan tingginya tingkat pelanggaran Peraturan Daerah di wilayah Kabupaten Cilacap;
- c) Pemadaman kebakaran dan penyelamatan tidak tertangani sesuai *response time* di wilayah manajemen kebakaran;
- d) Pemadaman kebakaran masih menimbulkan kerugian material yang relatif besar;
- e) Pos Pemadam Kebakaran Kroya dan Sidareja perlu dibangun secara permanen dan mandiri agar memudahkan dalam layanan kebakaran

- f) Terbatasnya sumber daya petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan belum memenuhi standar minimal 1 (satu) unit kendaraan oleh 18 (delapan belas) petugas pemadam kebakaran;
- g) Kondisi dan usia kendaraan yang tersedia relatif memerlukan biaya perawatan yang tinggi.

## 2) Solusi

- a) Mengintensifkan pemberdayaan Satpol PP Kecamatan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah Kecamatan, serta pengusulan penambahan personil Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
- b) Pelaksanaan kegiatan penegakan Perda melalui sosialisasi dan pembinaan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dengan mengedepankan upaya preventif terhadap masyarakat;
- c) Penambahan unit Pos Pemadam Kebakaran sesuai kajian RISPK dari 4 unit pos menjadi 7 Pos Pemadaman Kebakaran;
- d) Tersedianya standar minimal armada kebakaran di setiap Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 2 unit terdiri dari truk pemadam kebakaran dan mobil tangki *water supply* damkar;
- e) Sementara masih menempati bangunan milik Kecamatan Sidareja dan gudang milik BPPKAD Kroya;
- f) Tersedianya pasokan air pemadam kebakaran melalui penambahan hydran mandiri dan penambahan pilar hydran PDAM masuk sampai ke pemukiman penduduk;
- g) Rekrutmen tenaga Suka Rela kebakaran di setiap RW wilayah Kabupaten Cilacap;
- h) Ketersediaan anggaran perawatan pompa pemadam kebakaran dan *body repair* armada yang memadai untuk setiap unit kendaraan damkar.

## b. Sub Urusan Bencana Daerah

### 1) Permasalahan

- a) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia khususnya tenaga pelaksana apabila dibandingkan dengan struktur organisasi yang ada, termasuk keberadaan 4 (empat) UPT yang ada di wilayah eks distrik;

- b) Sarana sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana masih sangat terbatas.
  - c) Belum memadainya sarana prasarana di UPT BPBD sebagai ujung tombak penanganan bencana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada korban bencana, antara lain belum memadainya sarana mobilitas maupun peralatan kebencanaan lainnya.
- 2) Pemecahan Masalah
- Untuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
- a) Penambahan personil / karyawan yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya khususnya tenaga fungsional yang menangani kebencanaan;
  - b) Pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana prasarana kerja sebagai sarana penunjang penanganan kebencanaan khususnya peralatan kebencanaan;
  - c) Pembuatan dan penambahan sarana peringatan dini bencana secara memadai sesuai jumlah yang diperlukan dalam upaya pengurangan risiko bencana baik melalui APBD maupun menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu.

## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Bidang Urusan Sosial meliputi:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Warga negara penyandang disabilitas	6.463
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Anak telantar	7.478
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Warga negara lanjut usia telantar	8.754
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Warga negara gelandangan dan pengemis	99

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran Penerima Pelayanan Dasar	Jumlah
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Warga negara korban bencana	10.572

## 2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pelayanan dasar SPM Bidang Urusan Sosial di Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	112
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	185
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	300
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	61
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kab / kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	10.572

## 3. Realisasi Pencapaian SPM

a. Tabel Pencapaian Penerima Layanan Dasar Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	112	107	95,54%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	185	175	94,59%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Capaian %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	300	300	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	61	77	126,23%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana kab / kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	10.572	10.572	100%

b. Tabel Pencapaian Mutu Layanan Dasar Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Penyediaan Permakanan	35	45	128,57
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat bantu	41	62	151,21
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	10	0	0
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	0	0	0
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	26	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0
		Layanan Rujukan	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0
		Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar panti	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0
		Penyediaan Permakanan	100	100	100
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat bantu	0	0	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	55	72	130,90
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	0	0	0
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0
		Layanan Rujukan	30	3	10
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
		Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan			
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>16,06</b>
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia telantar di luar panti	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0
		Penyediaan Permakanan	300	300	100
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat bantu	0	0	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar	0	0	0
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	0	0	0
		Layanan Rujukan	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
		Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan			
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			<b>6,67</b>
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Layanan Data dan Pengaduan	0	0	0
		Penyediaan Permakanan	10	10	100
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Alat bantu	0	0	0
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan	0	0	0
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial	0	0	0
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Gelandangan dan Pengemis Terlantar	0	0	0
		Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
		Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak			
		Akses ke Layanan Pendidikan & Kesehatan Dasar	51	67	131,37
		Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	0	0	0
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	51	56	109,80
		Layanan Rujukan	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Tidak Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Sudah Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti	0	0	0
		Penyediaan Layanan Kedaruratan Bagi Daerah Yang Belum Memiliki Kendaraan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Diluar Panti dan Mampu Melakukan Pengadaan Kendaraan Baru dan Pembiayaan Pemeliharaan	0	0	0
		<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Penyediaan Permakanan	10.572	10.572	100
		Penyediaan Sandang	0	0	0
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	0	0	0

No.	Jenis Pelayanan dasar	Mutu Layanan Dasar	Target (Jumlah orang yang akan terlayani)	Realisasi Capaian Mutu Pelayanan Dasar	
				Jumlah orang yang terlayani	(%)
1	2	3	5	6	7
		Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	0	0	0
		Pelayanan Dukungan Psikososial	0	0	0
<b>Persentase Pencapaian Mutu Layanan Dasar</b>					<b>20</b>

#### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Bidang Urusan Sosial di Tahun 2021 adalah Total Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp1.071.287.900,- dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp936.635.178,- (atau persentase penyerapan anggaran 87,43%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021.

#### 5. Dukungan Personil

##### ■ Jumlah personil Dinas Sosial Kabupaten Cilacap

- PNS : 19 orang
- CPNS : 1 orang
- Non PNS : 17 orang

##### ■ Jumlah Tenaga Sukarela

- Tagana : 54 orang (termasuk TKSK 24 orang)
- Satuan Bhakti Pekerja Sosial : 2 orang
- Pekerja Sosial : 1 orang
- Psikolog : -
- Pendamping Disabilitas : 1 orang
- Pendamping Prog. Sembako : 1 orang

##### ■ Jumlah Tenaga Program Keluarga Harapan (PKH)

- Koord. Kabupaten : 2 orang
- Administrator Pangkalan Data : 4 orang
- Pendamping Sosial PKH : 266 orang

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

- 1) Belum adanya verval data PMKS yang valid dan data pilah dasar sesuai SPM sehingga dapat menghambat dalam rangka *update* data berkelanjutan serta penanganan PMKS tersebut;
- 2) Belum adanya *shelter* atau rumah singgah pada Kabupaten Cilacap sehingga belum dapat menampung pelayanan dasar di luar panti pada Bidang Sosial.
- 3) Belum optimalnya peran TKSK dan PSKS dalam mendukung capaian SPM.

### b. Solusi

- 1) Melakukan verval data PMKS pada setiap tahun dengan data pilah dasar sesuai SPM;
- 2) Membangun dan mengoperasikan *shelter* atau rumah singgah di Kabupaten Cilacap untuk pelayanan dasar luar panti.
- 3) Optimalisasi peran TKSK dan PSKS melalui pembinaan intensif.

**BAB III**  
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.174.800.200	25.818.065.570	91.6	APBD
		JUMLAH	28.174.800.200	25.818.065.570	91.6	APBD
2	Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	173.330.983.400	170.226.308.440	98.2	APBD
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	89.005.436.343	84.975.946.919	95.5	APBD
		JUMLAH	262.336.419.743	255.202.255.359	97.2	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.042.365.000	4.528.808.824	89.8	APBD
		JUMLAH	5.042.365.000	4.528.808.824	89.8	APBD
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>295.553.584.943</b>	<b>285.549.129.753</b>	<b>96.6</b>	<b>APBD</b>

**B. BIDANG URUSAN KESEHATAN**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	370.595.500	230.397.550	62,17	APBD
		JUMLAH	370.595.500	230.397.550	62,17	APBD
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3.579.791.000	1.926.927.445	53,83	APBD
		JUMLAH	3.579.791.000	1.926.927.445	53,83	APBD
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	140.800.000	113.820.000	80,84	APBD
		JUMLAH	140.800.000	113.820.000	80,84	APBD
4	Pelayanan kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan kesehatan Balita	1.925.264.000	765.633.000	39,77	APBD
		JUMLAH	1.925.264.000	765.633.000	39,77	APBD
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	24.800.000	23.700.000	95,56	APBD
		JUMLAH	24.800.000	23.700.000	95,56	APBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	90.589.114	89.794.114	99,12	APBD
		JUMLAH	90.589.114	89.794.114	99,12	APBD
7	Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	178.275.000	152.439.000	88,51	APBD
		JUMLAH	178.275.000	152.439.000	88,51	APBD
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	31.458.600	31.458.600	100	
		JUMLAH	31.458.600	31.458.600	100	APBD
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	28.480.600	18.930.600	66,47	APBD
		JUMLAH	28.480.600	18.930.600	66,47	APBD
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa berat	90.000.000	83.790.000	93,10	APBD
		JUMLAH	90.000.000	83.790.000	93,10	APBD
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	250.999.565	247.313.750	98,53	APBD
		JUMLAH	250.999.565	247.313.750	98,53	APBD
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	261.999.850	261.999.850	100	APBD
		JUMLAH	261.999.850	261.999.850	100	APBD
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>6.973.053.229</b>	<b>3.946.203.909</b>	<b>56,59</b>	<b>APBD</b>

### C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	1.272.665.625	1.263.199.000	99,26	APBD
		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.567.884.000	10.531.402.060	99,65	APBD
		<b>JUMLAH</b>	<b>11.840.549.625</b>	<b>11.794.601.060</b>	<b>99,61</b>	<b>APBD</b>
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pembangunan / Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	8.727.847.950	8.707.457.750	99,77	APBD
		Pembangunan/Penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	88.555.000	86.971.000	98,21	APBD
		Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	20.000.000	17.876.650	89,38	APBD
		Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	50.000.000	40.412.450	80,82	APBD
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	90.573.000	90,57	APBD
		<b>JUMLAH</b>	<b>8.986.402.950</b>	<b>8.943.290.850</b>	<b>99,52</b>	
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>20.826.952.575</b>	<b>20.737.891.910</b>	<b>99,57</b>	<b>APBD</b>

#### D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	450.000.000	357.453.400	79,43	APBD
		JUMLAH	450.000.000	357.453.400	79,43	APBD
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	7.000.000	7.000.000	100	APBD
		JUMLAH	7.000.000	7.000.000	100	APBD
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>457.000.000</b>	<b>364.453.400</b>	<b>79,74</b>	<b>APBD</b>

#### E. BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Total Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapain SPM di Bidang Urusan Trantibumlinmas di Tahun 2021 (baik termasuk Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sub Urusan Kebakaran Daerah, serta Sub Urusan Bencana Daerah) adalah sebesar Rp15.638.573.880,-, dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp11.035.856.670,- (atau persentase penyerapan anggaran 70,57%), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Sub Urusan Kebakaran Daerah
  - a. Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan SPM pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sebesar Rp7.481.561.700,- dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.481.561.700</b>	<b>3.431.279.900</b>	<b>45,86</b>
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5.721.889.700	1.706.140.000	30
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk rasa dan Kerusuhan Massa	130.000.000	128.060.000	98,51
		Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	100.000.000	100.000.000	100
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.419.672.000	1.387.779.900	93,66
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	110.000.000	109.300.000	99,36

- b. Alokasi anggaran untuk mendukung penerapan SPM Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, sebesar Rp3.387.400.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>3.387.400.000</b>	<b>3.375.709.070</b>	<b>99,65</b>
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.297.400.000	3.285.709.070	99,65
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	30.000.000	30.000.000	100
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	60.000.000	60.000.000	100

## 2. Sub Urusan Bencana Daerah

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	285.500.000	285.500.000	100 %	APBD
		JUMLAH	285.500.000	285.500.000	100 %	APBD
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiaga-anterhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	3.754.594.480	3.623.726.000	96,5 %	APBD
		JUMLAH	3.754.594.480	3.623.726.000	96,5 %	APBD
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	729.481.700	319.641.700	43,8 %	APBD
		JUMLAH	729.481.700	319.641.700	43,8 %	APBD
<b>TOTAL JUMLAH</b>			<b>4.769.576.180</b>	<b>4.228.867.700</b>	<b>88,66%</b>	<b>APBD</b>

## F. BIDANG URUSAN SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
1	Rehabilitasi Sosial Dasar penyandang disabilitas telantar diluar panti	<p>Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>Kegiatan: Rehabilitasi Dasar Sosial Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <p>Sub Kegiatan: - Penyediaan Permakanan - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (1) - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial (2) - Penyediaan Alat Bantu - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</p>	<p>80.973.300 0 2.610.850 90.789.600 4.010.550</p>	<p>76.285.845 0 0 90.537.600 0</p>	<p>94,21 - - 99,72 -</p>	APBD
		<b>JUMLAH</b>	<b>178.384.300</b>	<b>166.823.445</b>	<b>93,53</b>	
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak telantar di luar panti	<p>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>Kegiatan: Pemeliharaan Anak-Anak Telantar</p> <p>Sub Kegiatan: - Penjangkauan Anak-Anak Telantar - Rujukan Anak-Anak Telantar - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan</p>	<p>21.541.000 11.666.000 165.712.850</p>	<p>12.091.000 1.013.500 165.312.850</p>	<p>56,13 8,69 99,76</p>	APBD
		<b>JUMLAH</b>	<b>198.919.850</b>	<b>178.417.350</b>	<b>89,69</b>	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia telantar di luar panti	<p>Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>Kegiatan: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat</p>	<p>128.084.050</p>	<p>57.216.000</p>	<p>44,67</p>	APBD

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	%	Sumber Dana
		Kewenangan Kabupaten/Kota				
		<i>JUMLAH</i>	<i>128.084.050</i>	<i>57.216.000</i>	<i>44,67</i>	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan: Rehabilitasi Dasar Sosial Penyandang Disabilitas Telantar, Anak Telantar, Lanjut Usia Telantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  Sub Kegiatan: - Penyediaan Permakanan - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	   7.194.000 186.745.700  26.450.000	   7.194.000 183.969.383  7.350.000	   100 98,51  27,79	APBD
		<i>JUMLAH</i>	<i>220.389.700</i>	<i>198.513.383</i>	<i>90,07</i>	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Program Penanganan Bencana Kegiatan: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan: Penyediaan Makanan	   345.510.000	   335.665.000	   88,10	APBD
		<i>JUMLAH</i>	<i>345.510.000</i>	<i>335.665.000</i>	<i>88,10</i>	
		<b>TOTAL JUMLAH</b>	<b>1.071.287.900</b>	<b>936.635.178</b>	<b>87,43</b>	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Cilacap harus memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, selain dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparaturnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan Kabupaten Cilacap. Sehingga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing Kementerian. Dalam upaya tersebut telah dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 serta dokumen Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM.

Dengan diundangkannya peraturan terbaru terkait penerapan SPM pada penghujung tahun 2021, yakni Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, terdapat cukup banyak hal substansial terkait kaidah-kaidah penerapan SPM yang berubah dibandingkan dengan isi Permendagri 100 Tahun 2018. Ketentuan yang berubah tersebut, salah satunya termasuk mengenai bentuk format Laporan Penerapan SPM, yang mana dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 kini menentukan bahwa Laporan Penerapan SPM tidak hanya mengakomodir Capaian Penerima Layanan Dasar SPM saja, melainkan juga mengakomodir Capaian Mutu Pelayanan Dasar.

Namun demikian, mendasari arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa untuk format penyampaian Laporan Penerapan SPM Tahun 2021 masih mengacu pada Permendagri 100 Tahun 2018. Di samping itu, dalam Laporan Penerapan SPM Tahun 2021 ini juga terdapat sedikit modifikasi, dengan mengakomodir Capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM untuk tiap urusan layanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.

Capaian tersebut akan terus ditingkatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar warga Negara khususnya masyarakat Kabupaten Cilacap menuju “Kabupaten Cilacap yang semakin sejahtera secara merata” melalui semangat “Bangga Mbangun Desa”.

Demikianlah Laporan Penerapan SPM di Kabupaten Cilacap Tahun 2021, dan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Cilacap senantiasa terbuka terhadap saran masukan yang positif dari seluruh komponen masyarakat.